# KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

**Selasa, 30 April 2019**

**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**
**DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

# DAFTAR ISI

| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Koran Tempo (Halaman, 14) | Selasa, 30 April 2019 | Ahli Ragu Pemerintah Serius Pindahkan Ibu Kota | Pengamat tata kota melihat wacana pemindahan Ibu Kota selalu muncul ketika banjir melanda Jakarta. Pengamat tata kota dari Pusat Studi, Nirwono Joga, meragukan rencana pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Sebab, rencana itu sudah lama diwacanakan, tapi tidak pernah terealisasi. Selain itu, ia melihat banyak contoh pemindahan ibu kota di negara lain justru kurang berhasil. |
| **2** | Koran Tempo (Halaman, 18) | Selasa, 30 April 2019 | Anies Ingin Bangun Waduk Baru di Kawasan Hulu | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan keinginan untuk membangun waduk dan kolam-kolam retensi baru di kawasan hulu Ciliwung. Dalam membangun kantong-kantong baru penampung air banjir itu, pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Kalau itu dibuatkan waduk-waduk, volume air yang turun akan terkendali. Itulah jangka pendek yang harus segera dituntaskan,” ujar Anies kemarin. |
| **3** | Media Indonesia (Halaman Utama) | Selasa, 30 April 2019 | Pemindahan Ibukota Mengerucut ke Kalimantan. | Pemindahan ibu kota negara mempertimbangkan masa depan Indonesia pada 2030 yang diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia. Pemerintah memantapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yakni ke Kalimantan. Selain pertimbangan padatnya Pulau Jawa, pemindahan ibu kota juga demi pemerataan pembangunan. |
| **4** | Kompas (Halaman Utama) | Selasa, 30 April 2019 | Kota Memerlukan Penyangga Pangan | Perkembangan kota harus ditopang oleh sistem penyangga ketahanan pangan. Di tengah semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota dan degredasi lahan pertanian, penyediaan pangan menjadi tantangan besar pada masa depan, terutama di wilayah perkotaan. |
| **5** | Kompas (Halaman Utama) | Selasa, 30 April 2019 | Banjir masih mengancam | Intensitas hujan lebat hingga ekstrem semakin sering terjadi seiring dengan perubahan iklim. Perubahan pola cuaca ini meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan longsor. |
| **6** | Kompas (Halaman, 2) | Selasa, 30 April 2019 | Prinsip Pindah Disetujui | Pemerintah secara prinsip setuju ibukota negara dipindahkan dari Jakarta ke tempat lain. Perpindahan ini untuk kepentingan jangka panjang. |
| **7** | Kompas (Halaman, 17) | Selasa, 30 April 2019 | Badan Usaha Jalan Tol Butuh Kepastian | Pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah. Meski demikian, badan usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait investasi, proses perjanjian dan pembangunan. |
| **8** | Bisnis Indonesia (Halaman, 3) | Selasa, 30 April 2019 | Peluang Baru Ibukota Baru | Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa bakal menelan investasi hingga US$33 miliar dan membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat. |

| Judul | **Ahli Ragu Pemerintah Serius Pindahkan Ibukota** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Koran Tempo (Halaman, 14) | | |
| Resume | Pengamat tata kota melihat wacana pemindahan Ibukota selalu muncul ketika banjir melanda Jakarta. Pengamat tata kota dari Pusat Studi, Nirwono Joga, meragukan rencana pemerintah yang hendak memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Sebab, rencana itu sudah lama diwacanakan, tapi tidak pernah terealisasi. Selain itu, ia melihat banyak contoh pemindahan ibukota di negara lain justru kurang berhasil. | | |

TEMPO/SUBEKTI

Sudut Ibu Kota Jakarta di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 2 Januari lalu.

# Ahli Ragu Pemerintah Serius Pindahkan Ibu Kota

**Rezki Alvionitasari**
*rezki.alvionita@tempo.co.id*

**JAKARTA** – Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, meragukan rencana pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Sebab, rencana itu sudah lama diwacanakan, tapi tidak pernah terealisasi. Selain itu, ia melihat banyak contoh pemindahan ibu kota di negara lain justru kurang berhasil.

Nirwono mencontohkan pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Faktanya, kata dia, meski Putrajaya dijadikan pusat pemerintahan, setiap akhir pekan penghuninya pergi ke Kuala Lumpur atau kota lain. "Saya meragukan kehadiran ibu kota baru ini akan berhasil," kata Nirwono, kemarin.

bangunan kota menjadi hidup membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Yang dimaksud kota yang hidup adalah kota menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kegiatan kebudayaan. "Era Pak Jokowi lima tahun, siapa yang menjamin setelah era itu, pemerintah berikutnya akan melanjutkan?" katanya.

**"Pemerintah harus segera memilih satu dari opsi kota yang diberikan supaya tidak menimbulkan persoalan baru."**

**Yayat Supriyatna**

Dalam rapat dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Namun, dalam rapat itu, Jokowi belum memutuskan calon kota pengganti Jakarta tersebut.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan awalnya lembaganya memberikan tiga alternatif soal kajian pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi. Lalu memilih satu di antara tiga alternatif tersebut. "Dari tiga alternatif tersebut, Presiden memutuskan untuk memilih alternatif yang ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa," kata Bambang. Bambang belum menyebutkan daerah yang dipilih di luar Jawa itu.

## Kota Ideal Pengganti Jakarta

**PRESIDEN** Joko Widodo menyetujui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, kemarin. Daerah yang dipilih sebagai pengganti Jakarta dipastikan berada di luar Pulau Jawa. Berikut ini kriteria calon daerah ideal pengganti Jakarta menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna; dan pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga.

### Versi Pengamat

- Secara proporsional, daerah itu harus menjadi wajah Indonesia baru ke depan.
- Kota itu mengedepankan kekuatan lingkungan berbasis ramah lingkungan.
- Kota tersebut menerapkan *smart city*.
- Didukung dengan sistem utilitas.
- Nyaman ditempati, layak huni, dan belum ramai.
- Didukung sistem transportasi yang memadai, hemat, serta efisien dari sisi pergerakan dan mobilitas.
- Aman dari bencana, seperti gempa, asap, kebakaran, dan banjir.
- Infrastruktur daerah tersebut sudah siap, bukan membangun dari nol.
- Sarana air di kota itu terpenuhi secara mandiri.
- Permukaan tanah di daerah itu berbentuk datar karena lebih mudah membangun.

### Versi Badan PerencanaanPembangunan Nasional

- Kota tersebut harus memiliki kondisi alam yang stabil.
- Memiliki potensi bencana alam yang sangat kecil.
- Di daerah tersebut harus terdapat ketersediaan tanah milik negara yang besar, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan lahan.

NASKAH: REZKI ALVIONITASARI
SUMBER: PENGAMAT TATA KOTA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

jika pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa, sebaiknya sudah ada konsep yang jelas serta desain besar mengenai lokasi, biaya, dan lama pembangunan. Sebab, ia melihat wacana pemindahan ibu kota selalu muncul ketika banjir melanda Jakarta. "Itu yang saya lihat sampai sekarang, tindak lanjutnya tidak pernah ada," katanya.

Ia juga berpendapat, alasan banjir dan macet tidak tepat sebagai dalih untuk memindahkan ibu kota. Ia justru menyarankan agar pemerintah terlebih dulu membenahi urusan banjir dan macet di Jakarta, baru berpikir memindahkan ibu kota. "Nanti kesannya lepas tanggung jawab. Meski ibu kota dipindahkan, banjir dan macet tidak akan pernah selesai kalau tidak ditangani dengan baik," katanya.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, berpendapat bahwa pemerintah harus segera menentukan satu daerah pengganti Jakarta. Sebab, jika pemerintah berlarut-larut menetapkan calon ibu kota baru itu, akan muncul di masyarakat. "Pemerintah harus segera memilih satu dari opsi kota yang diberikan supaya tidak menimbulkan persoalan baru dan tidak menimbulkan spekulasi lahan," kata Yayat.

Setelah itu, kata Yayat, pemerintah segera memasukkan agenda tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian pemerintah memperhatikan potensi perkembangan calon ibu kota tersebut. "Pemerintah bisa berfokus dengan potensi perkembangannya, bukan sekadar memindahkan ibu kota, tapi bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya.

Yayat mengatakan pekerjaan terberat pemerintah nantinya adalah memindahkan kantor pemerintahan ke daerah baru. Sebab, kata dia, dalam proses pemindahan ini tidak hanya urusan memindahkan gedung pemerintahan, tapi juga soal ribuan pegawai yang bekerja di kantor itu. Ia menyarankan agar pemerintah memindahkan lembaga pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor kementerian koordinator. Ia juga berharap agar daya dukung infrastruktur di ibu kota baru nantinya memudahkan aktivitas laut, udara, dan darat. ●

| Judul | **Anies Ingin Bangun Waduk Baru di Kawasan Hulu** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Koran Tempo (Halaman, 18) | | |
| Resume | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan keinginan untuk membangun waduk dan kolam-kolam retensi baru di kawasan hulu Ciliwung. Dalam membangun kantong-kantong baru penampung air banjir itu, pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Kalau itu dibuatkan waduk-waduk, volume air yang turun akan terkendali. Itulah jangka pendek yang harus segera dituntaskan,” ujar Anies kemarin. | | |

# Anies Ingin Bangun Waduk Baru di Kawasan Hulu

**Avit Hidayat**
avit.hidayat@tempo.co.id

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Pembangunan Bendungan Ciawi-Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, 1 April lalu.

Balai Besar menyarankan pemerintah DKI berfokus memulihkan situ-situ lama.

**JAKARTA** – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan keinginan untuk membangun waduk dan kolam-kolam retensi baru di kawasan hulu Ciliwung. Dalam membangun kantong-kantong baru penampung air banjir itu, pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Kalau itu dibuatkan waduk-waduk, volume air yang turun akan terkendali. Itulah jangka pendek yang harus segera dituntaskan," ujar Anies, kemarin.

Anies melontarkan gagasan tersebut setelah 13 wilayah di Jakarta dilanda banjir pada akhir pekan lalu. Menurut dia, banjir pekan lalu merupakan banjir kiriman setelah terjadi curah hujan ekstrem di kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane. Akibatnya, banjir pun merata di semua wilayah pesisir, termasuk DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. "Yang paling mendasar adalah mengendalikan debit air yang masuk ke wilayah pesisir," kata dia.

Rencana Anies membangun waduk dan kolam retensi ini di luar pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang merupakan proyek pemerintah pusat. Sebelumnya, untuk pengendalian banjir di Ibu Kota, Anies kerap menggaungkan pentingnya program naturalisasi sungai—sebagai alternatif dari normalisasi (pengerukan dan pelebaran) sungai yang melintasi Ibu Kota. Anies juga gencar mengkampanyekan pentingnya pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan secara massal di Ibu Kota.

Anies menambahkan, dia telah meminta Dinas Sumber Daya Air DKI untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya Bogor dalam mencari tempat membangun waduk dan kolam retensi baru itu. Dia pun mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya ihwal rencana tersebut.

Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, masalah banjir yang kerap melanda wilayah DKI Jakarta baru dibicarakan secara umum dalam rapat koordinasi antar-daerah bertetangga itu. "Secara general sudah dikomunikasikan terkait dengan masalah perbatasan," kata Ridwan, kemarin. "Dalam koordinasi selanjutnya bisa lebih ke teknis membahas isu-isu terkini, mungkin salah satunya urusan aliran air dan dampak-dampaknya."

Adapun Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah, menyarankan agar Anies mengalihkan rencana dan anggaran membangun waduk baru untuk merevitalisasi situ-situ di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Mending optimalkan situ-situ yang ada dulu karena banyak yang beralih fungsi," kata dia.

Bambang menjelaskan, dari 205 situ yang pernah terdata di wilayah Jabodetabek, kini yang tersisa tinggal 190 situ. Sebanyak 15 situ hilang tanpa bekas. Sedangkan 190 situ yang tersisa pun terancam beralih fungsi menjadi permukiman. Balai Besar tengah mengukur ulang dan mematok lahan kawasan situ-situ lama untuk mencegah pendudukan dan alih fungsi situ secara liar. Bila berhasil direvitalisasi, kata Bambang, situ-situ lama akan berdampak signifikan pada pengendalian banjir di Jakarta.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya agar mewaspadai banjir susulan. Sebab, cuaca ekstrem diprediksi masih melanda wilayah Jabodetabek selama pekan ini. "Kami imbau warga mewaspadai cuaca ekstrem, seperti hujan deras, dalam beberapa hari ke depan," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, kemarin.

● LANI DIANA | AHMAD FIKRI

| Judul | **Pemindahan Ibukota Mengerucut ke Kalimantan.** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Media Indonesia (Halaman Utama) | | |
| Resume | Pemindahan ibu kota negara mempertimbangkan masa depan Indonesia pada 2030 yang diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia. Pemerintah memantapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yakni ke Kalimantan. Selain pertimbangan padatnya Pulau Jawa, pemindahan ibu kota juga demi pemerataan pembangunan. | | |

# Pemindahan Ibu Kota Mengerucut ke Kalimantan

*Pemindahan ibu kota negara mempertimbangkan masa depan Indonesia pada 2030 yang diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.*

**Dero Iqbal Mahendra**
*dero@mediaindonesia.com*

PEMERINTAH memantapkan rencana pemindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yakni ke Kalimantan. Selain pertimbangan padatnya Pulau Jawa, pemindahan ibu kota juga demi pemerataan pembangunan.

"Dalam membicarakan soal ini (pemindahan ibu kota negara), kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek. Kita harus berbicara kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," tutur Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, selain kepadatan penduduk, masalah kemacetan dan bencana di Pulau Jawa juga menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota negara.

Gagasan pemindahan ibu kota negara, lanjut Jokowi, sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, dan presiden-presiden selanjutnya. Namun, gagasan tersebut selalu timbul tenggelam.

Jokowi menegaskan ide pemindahan pusat pemerintahan sesungguhnya sudah dilakukan banyak negara lain.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pertimbangan rasional terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ialah untuk mengurangi beban Jakarta, Jabodetabek, dan Pulau Jawa yang saat ini menanggung hampir 50% ekonomi Indonesia.

"Selain itu, mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur, mengubah *mindset*, supaya lebih Indonesia-sentris. Jika nantinya diambil keputusan untuk pemindahan ibu kota, Bappenas menawarkan opsi jangka waktu 5 tahun dan 10 tahun," imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan pemerintah memilih opsi memindahkan ibu kota pemerintah ke luar Pulau Jawa dengan kebutuhan lahan 40 ribu hektare jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) berpindah ke kawasan baru.

### Disambut baik

Rencana pemindahan ibu kota negara disambut baik berbagai pihak asalkan mimpi besar itu dikaji secara matang. "Ibu kota sebagai pusat pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kerja presiden, menteri, dan jajarannya. Namun, perencanaan tersebut harus dibarengi dengan strategi pembangunan di luar Jawa yang matang," ujar mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansah Djohan.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemindahan ibu kota negara akan memperkuat posisi geopolitik Indonesia dalam membangun poros maritim dunia.

"Pemindahan ibu kota juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia yang mana pada 2030 diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia," ujarnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, dengan perencanaan yang matang, bukan sesuatu yang sulit untuk mewujudkan pemindahan itu. Indonesia pun, ujarnya, akan semakin punya posisi penting dalam percaturan dunia. (Ata/*/X-7)

| Judul | **Kota Memerlukan Penyangga Pangan** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Halaman Utama) | | |
| Resume | Perkembangan kota harus ditopang oleh sistem penyangga ketahanan pangan. Di tengah semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota dan degredasi lahan pertanian, penyediaan pangan menjadi tantangan besar pada masa depan, terutama di wilayah perkotaan. | | |

# Kota Memerlukan Penyangga Pangan

**JAKARTA, KOMPAS —** Perkembangan kota harus ditopang oleh sistem penyangga ketahanan pangan. Di tengah semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota dan degradasi lahan pertanian, penyediaan pangan menjadi tantangan besar pada masa depan, terutama di wilayah perkotaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa pada 2045. Ketika itu, porsi penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 67 persen, tumbuh dibandingkan dengan situasi tahun 2015 yang mencapai 53 persen.

Terkait hal tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meluncurkan inisiatif "Food for the Cities" tahun 2001 sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan urbanisasi. Adapun Kementerian Pertanian pada 2017 mengenalkan konsep pengembangan wilayah penyangga pangan.

Direktur Pengembangan Agribisnis Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, perusahaan pengembangan jaringan pasar induk, Soekam Parwadi, Senin (29/4/2019), berpendapat, langkah yang perlu ditempuh perkotaan untuk membangun ketahanan pangan, antara lain, dengan menggerakkan pertanian kota dan membangun pola distribusi yang memotong rantai pasok dari daerah penghasil.

Hal lain dilakukan lewat program belanja komunal secara daring untuk memotong rantai. Selain dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Soekam, pola yang sama juga dibangun oleh kota lain, seperti Surabaya, Palembang,

**(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)**

# *Kota Memerlukan*

**(Sambungan dari halaman 1)**

Denpasar, dan Semarang.

Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ketahanan pangan kota ditempuh dengan mengidentifikasi komoditas yang dibutuhkan warga, lalu memetakan kemampuan daerah sekitar untuk memproduksi bahan pangan. Dia mencontohkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). "Lampung menyuplai buah dan sayur; Jawa Barat menyuplai ayam, telur, dan beras; serta Banten menyuplai jagung (ke Jabodetabek)," ujarnya.

Kesiapan pasokan pangan penting bagi Jakarta yang 98 persen kebutuhan pangannya dipasok dari luar wilayah itu. Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, DKI Jakarta melakukan kontrak pertanian dengan daerah penghasil untuk memastikan pasokan.

Menurut Direktur Pangan dan Pertanian Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas R Anang Noegroho Setyo Moeljono, ketahanan pangan wilayah perkotaan menjadi salah satu fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam rencana tersebut, ketahanan pangan dijaga dengan memperkuat ketersediaan dan akses pangan. Rantai logistik terus diperbaiki agar distribusi makin lancar.

(KRN/JUD/IRE/NSA/FLO/OKA/SYA/ITA/NIK/TAM/IDO)

| Judul | **Banjir masih mengancam** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Halaman Utama) | | |
| Resume | Intensitas hujan lebat hingga ekstrem semakin sering terjadi seiring dengan perubahan iklim. Perubahan pola cuaca ini meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan longsor. | | |

# Banjir Masih Mengancam

Intensitas hujan lebat hingga ekstrem semakin sering terjadi seiring dengan perubahan iklim. Perubahan pola cuaca ini meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan longsor.

KOMPAS/YOHANES JEMALI

**JAKARTA, KOMPAS** — Banjir dan longsor yang terjadi paling tidak di 26 kabupaten/kota di 9 provinsi dalam sepekan terakhir dipicu hujan lebat di atas 50 milimeter per hari hingga ekstrem di atas 100 milimeter per hari. Banjir dan longsor tetap mengancam, terutama di area yang vegetasinya terdegradasi karena hujan lebat masih berpeluang terjadi hingga minggu pertama Mei 2019.

Setelah Jakarta dan sekitarnya, banjir dan longsor melanda Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Hingga kemarin, total 34 orang tewas dan 6 warga hilang.

Pada Minggu (28/4/2019), banjir bandang melanda empat desa di Kecamatan Gumbasa dan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulteng. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi satu desa tertimbun lumpur dan pasir yang terbawa Sungai Bora yang meluap. Lumpur menggunung hingga 3 meter, menyisakan bagian atas rumah. Di tiga desa lainnya, banjir bandang membawa lumpur dan potongan kayu gelondongan.

Banjir bandang ini merupakan yang kedua. Yang pertama terjadi pada 28 November 2018. Warga menyatakan banjir bandang kali ini paling parah. Banjir bandang terjadi setelah hujan lebat mengguyur Sigi pada Sabtu (27/4) hingga Minggu.

"Saya bertahan di atas rumah selama dua jam sampai tim SAR

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-5)

ANTARA/UMARUL FARUQ

**Rumah warga** di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dihantam banjir bandang disertai lumpur dan material lain, seperti terlihat Senin (29/4/2019) (atas). Di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan pengendara sepeda motor melewati tanggul penahan lumpur Lapindo untuk menghindari banjir, Senin. Pengendara sepeda motor tidak bisa melewati jalan raya Porong yang terendam air setinggi 60 sentimeter (bawah).

# *Banjir Masih Mengancam*

**(Sambungan dari halaman 1)**

datang mengevakuasi saya," kata Irman (36), warga Desa Bangga, Senin (29/4).

Desa Bangga paling parah terdampak banjir bandang. Bupati Sigi Irwan Lapatta, di lokasi banjir, mengatakan, lumpur dan pasir yang terbawa air sungai kemungkinan berasal dari longsoran di pegunungan. Longsoran ini diduga dipicu gempa 28 September 2018.

Di Kalimantan Tengah, banjir melanda 13 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Lamandau. Pondok dan dermaga di sekitar Sungai Batang Kawa, anak Sungai Lamandau, terendam hingga atap. Warga menduga banjir terjadi karena hutan telah berganti menjadi perkebunan. Sekretaris Desa Kubung, Kecamatan Kudangan, Kabupaten Lamandau, Tamel, menyatakan, "Kami belum pernah merasakan banjir. Ini yang pertama."

Banjir di sejumlah wilayah, seperti Bengkulu, Manado (Sulut), kemarin, mulai surut. Dari 12.000 pengungsi di 9 kabupaten/kota di Bengkulu, lebih kurang 50 persen telah kembali ke rumah. Mereka memerlukan bantuan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah yang rusak.

Kepala Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Syamsudin mengatakan, banjir ini yang terbesar dalam 30 tahun terakhir. "Hampir semua kawasan Bengkulu kini rawan banjir. Hanya Muko Muko yang tak terdampak," katanya.

Hingga kemarin, korban jiwa di Bengkulu 28 orang, sementara 6 warga masih dicari.

Sementara itu, longsor di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menewaskan enam warga. Adapun banjir yang melanda Lampung Selatan merendam sekitar 300 rumah.

## Perjalanan kereta

Di Jawa Timur, banjir di Pasuruan menyebabkan perjalanan sejumlah kereta api di bagian timur Jawa terlambat 40-229 menit. Arus deras air banjir menghanyutkan batuan *ballast* dan mengikis tanah yang menjadi tempat pelintasan kereta. Ketinggian air yang merendam rel berkisar 5-15 sentimeter.

"Dalam empat tahun terakhir, beberapa kali rel terendam banjir, tetapi ini paling parah karena merusak jalur dan menghambat perjalanan," kata Manajer Humas PT KAI Daop IX Jember Luqman Arif ketika dihubungi dari Banyuwangi.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tinggi di Indonesia pada Minggu-Senin bergeser ke bagian tengah dan timur Indonesia. Hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, Sulawesi Selatan, dengan intensitas 107 mm per hari. Hujan di atas 50 mm terjadi merata di Jawa bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan utara, Sulawesi bagian utara dan tengah, serta daerah Kepala Burung, Papua Barat.

Daerah-daerah yang berpeluang hujan lebat hingga 2 Mei antara lain Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Daerah-daerah ini, terutama Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, secara klimatis memang masih masuk musim hujan," kata Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto.

Hujan lebat dengan intensitas di atas 60 mm terekam di Flores bagian barat. "Hal ini adalah anomali karena MJO (Madden-Julian Oscillation) yang merambat dari barat ke timur bertabrakan dengan angin timuran yang kering dari Australia. Akibatnya, banyak sirkulasi angin yang meningkatkan hujan, termasuk di daerah NTT yang seharusnya sudah kemarau," ucap Siswanto.

Menurut dia, anomali hujan ekstrem ini merupakan bagian dari perubahan pola hujan yang terjadi di wilayah Indonesia. Kajian Siswanto menunjukkan terjadinya perubahan curah hujan di atas 50 mm dan 100 mm per hari. Tren ini meningkat pesat pada 1961-2010, seiring laju peningkatan suhu yang juga melonjak pada periode ini.

Dengan tren ini, risiko bencana banjir di Indonesia, menurut Siswanto, cenderung meningkat. Kerentanan bencana ini bertambah dengan degradasi lingkungan serta kepadatan hunian yang merangsek di area dataran banjir.

(AIK/IDO/OKA/VIO/GER/TAM/REN/NIK/RAM/ESA/VDL)

## Kejadian Banjir di Nusantara pada 2019

| Korban* (jiwa) | |
|---|---|
| Jumlah kejadian | 120 |
| Meninggal dan hilang | 193 |
| Luka-luka | 965 |
| Menderita dan mengungsi | 407.729 |

| Rumah* (unit) | |
|---|---|
| Rusak berat | 770 |
| Rusak sedang | 43 |
| Rusak ringan | 1.265 |
| Terendam | 30.730 |

*] data selama Maret 2019

| | Lokasi | Korban terdampak | Area terdampak | Penyebab |
|---|---|---|---|---|
| 26 April | DKI Jakarta | **1.539 jiwa** mengungsi | **32** titik banjir | Luapan Sungai Cliiwung |
| | Kota Tangerang, Banten | **781 keluarga** terdampak | **195** rumah | Luapan Sungai Cisadane |
| 28 April | Bengkulu | **13.000 jiwa** terdampak, **28 orang** meninggal, **6 orang** hilang | **9** kabupaten/kota | Longsor dan banjir bandang di kaki Gunung Bungkuk, Bengkulu tengah |
| | Sigi, Sulawesi Tengah | | **4** desa | Banjir bandang karena hujan selama dua hari. |
| 29 April | Ketapang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat | | **155** rumah | Luapan Sungai Pawan |
| | Luwu Utara, Luwu, Enrekang, dan Tana Toraja di Sulawesi Selatan | | **14** kecamatan | Luapan Sungai Saddang, Mata Allo, dan Pa'tau. |

Sumber: Litbang Kompas/XNA, Diolah dari Data BNPB dan Pemberitaan Kompas.

INFOGRAFIK: DIMAS

| Judul | **Prinsip Pindah Disetujui** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Halaman, 2) | | |
| Resume | Pemerintah secara prinsip setuju ibukota negara dipindahkan dari Jakarta ke tempat lain. Perpindahan ini untuk kepentingan jangka panjang. | | |

# Prinsip Pindah Disetujui

Pemerintah secara prinsip setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke tempat lain. Perpindahan ini untuk kepentingan jangka panjang.

**JAKARTA, KOMPAS —** Pemerintah secara prinsip menyetujui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Namun, masalah seperti lokasi ibu kota yang baru dan biaya pemindahan masih harus dikaji secara mendalam.

Dalam pengantar rapat terbatas tentang pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), Presiden Joko Widodo menegaskan, diperlukan cara berpikir jangka panjang dan berlingkup luas dalam membahas rencana pemindahan ibu kota. Pertimbangan utama pun harus kepentingan bangsa dan negara dalam menyongsong kompetisi global.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab apakah pada masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, sekaligus pusat bisnis," tutur Presiden.

Hadir dalam rapat itu, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, dan beberapa kepala daerah, seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

## Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

| Lokasi Rencana Ibu Kota Baru | Pertimbangan Pemindahan |
|---|---|
| Presiden Soekarno (1957)<br>• Palangkaraya, Kalimantan Tengah | Palangkaraya berada tepat di tengah-tengah Indonesia. |
| Presiden Soeharto (1997)<br>• Jonggol, Jawa Barat | Kawasan Jonggol telah disiapkan sebagai kota mandiri seluas 30 hektar. |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2013)<br>• Belum ada rencana | Beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta semakin berat. |
| Presiden Joko Widodo (2017-2019)<br>• Tetap di Jakarta, tapi ada distrik khusus<br>• Seputar Jabodetabek<br>• Di luar Jawa | • Beban Jakarta makin berat<br>• Kemajuan bangsa dan masyarakat |

Sumber: Litbang Kompas/XNA/EDR, diolah dari pemberitaan Kompas.

INFOGRAFIK: ARJENDRO

Wapres Kalla menyatakan, pemerintah menyetujui prinsip perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke suatu lokasi yang tepat. "Secara prinsip, arah perpindahan disetujui. Namun, kita belum membahas caranya, sistemnya, pendanaan, dan aspek-aspek yang dapat memengaruhi secara sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Ini butuh waktu panjang untuk mengkajinya," ujar Kalla.

Menurut Kalla, keputusan memindah ibu kota mungkin baru diambil pemerintah mendatang. "Bisa pada 2024 atau setelahnya," ujarnya.

Ia mencontohkan perpindahan Putrajaya, ibu kota Malaysia, yang muncul sejak 1980 dan baru ditetapkan sebagai pusat pemerintahan pada 2001.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, ada tiga alternatif untuk memindahkan ibu kota. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tetapi dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di seputar Istana dan Monas. Kedua, pusat pemerintahan dipindah ke lokasi yang dekat dengan Jakarta, misalnya di seputar Jabodetabek. Ketiga, memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa.

Anies Baswedan mengatakan, pekerjaan rumah Jakarta tetap harus diselesaikan meski ibu kota negara dipindah. (INA/HAR)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judul | **Badan Usaha Jalan Tol Butuh Kepastian** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
| Media | Kompas (Halaman, 17) | | |
| Resume | Pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah. Meski demikian, badan usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait investasi, proses perjanjian dan pembangunan. | | |

# Badan Usaha Jalan Tol Butuh Kepastian

**JAKARTA, KOMPAS** — Pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah. Meski demikian, badan usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait investasi, proses perjanjian, dan pembangunan.

Rapat Koordinasi Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), di Jakarta, Senin (29/4/2019), antara lain membahas hal itu. Dalam forum tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, tetap jadi prioritas pemerintah.

"Dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020, belanja modal untuk infrastruktur harus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 persen," kata Basuki.

Hingga kini, panjang jalan tol yang telah beroperasi sekitar 1.000 kilometer (km) dari target 1.852 km jalan tol terbangun sampai akhir 2019. Salah satu pencapaiannya adalah beroperasinya jalan tol Jakarta-Surabaya yang akan diuji keandalannya sebagai jalur mudik dan balik pada Lebaran tahun ini.

Terkait lahan, Basuki akan menemui Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk memastikan penggantian dana talangan telah diserahkan ke badan usaha jalan tol. Sebab, dana tersebut akan digunakan kembali untuk membangun jalan tol.

Berdasarkan data LMAN, khusus untuk tahun 2018, dari anggaran Rp 18 triliun, jumlah dana yang telah ditagihkan Rp 700 miliar dan yang telah dibayarkan LMAN Rp 636 miliar.

Ketua Umum ATI Desi Arryani berpendapat, pembangunan jalan tol yang masif menimbulkan tantangan. "Badan usaha jalan tol menghadapi tantangan pendanaan, yakni kebutuhan investasi yang besar. Tantangan teknisnya, (badan usaha) pasti menghadapi masalah pembebasan lahan," ujarnya.

Menurut Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto, secara umum kebutuhan badan usaha jalan tol saat ini adalah kepastian waktu dalam proses adendum perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) karena perubahan lingkup dalam pembangunan. Dalam proses konstruksi biasanya muncul permintaan, seperti pembangunan jalan layang atau jembatan penyeberangan orang dari pemerintah daerah yang berbeda dengan desain awal.

Kepastian waktu adendum PPJT dinilai penting karena perubahan lingkup itu terkait proses pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan. Kini koridor waktunya dianggap kurang jelas. "Misalnya mau memberi jawaban ke peminjam sebulan atau dua bulan lagi dianggap tidak jelas," ujarnya.

Selain itu, proses penggantian dana talangan diharapkan lebih cepat. Sampai saat ini, sekitar Rp 6,5 triliun talangan PT Waskita Toll Road belum diganti LMAN. (NAD)

| Judul | **Peluang Baru Ibukota Baru** | Tanggal | Selasa, 30 April 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Halaman, 3) | | |
| Resume | Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa bakal menelan investasi hingga US$33 miliar dan membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat. | | |

PERENCANAAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN

# Peluang Baru Ibu Kota Baru

**Bisnis, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa bakal menelan investasi hingga US$33 miliar dan membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat.**

*Yodie Hardiyan & Amanda Kusumawardhani*
*redaksi@bisnis.com*

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas *Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota* di Kantor Presiden, Senin (29/4). Presiden memilih opsi memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

Dua opsi lain yang sempat mencuat adalah memusatkan pemerintahan di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta atau memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta dalam radius 50 km hingga 70 km.

Keputusan itu menimbang jumlah populasi di Pulau Jawa yang sudah mencapai 57% dari total populasi di Indonesia, sedangkan jumlah populasi di Pulau Sumatra sekitar 21%, Pulau Sulawesi 7%, Pulau Kalimantan 6%, serta Papua dan Maluku 3%.

"Nah, ini masih 6% [Kalimantan]. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6%, 7%, dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujarnya, Senin (29/4).

Wacana pemindahan ibu kota ini telah dibahas sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, menurut Jokowi, isu ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dengan matang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan, keputusan pemilihan lokasi di luar Pulau Jawa ini akan dilanjutkan dengan rapat berikutnya yang akan membahas teknis, desain, dan masterplan.

Dia menjelaskan, terdapat dua skenario untuk pemindahan ibu kota. Skenario pertama, dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare serta investasi sekitar US$22 miliar—US$33 miliar.

Untuk skenario tersebut, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp250 triliun, sedangkan pihak swasta diharapkan ikut berkontribusi senilai Rp215 triliun. "Porsi pemerintah dan swasta hampir sama [dalam skenario pertama]."

Sementara itu, dalam skenario kedua, dibutuhkan lahan sekitar 30.000 hektare dengan nilai investasi yang hampir sama dengan skenario pertama, tetapi porsi pembiayaan pemerintah lebih sedikit dibandingkan dengan swasta.

Dia menambahkan, sumber pembiayaan rencana pemindahan ibu kota ini dapat berasal dari empat sumber, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Bambang menyebutkan, salah satu contoh biaya pemindahan ibu kota adalah di Korea Selatan dari Seoul ke Sejong sebesar US$22 miliar. Menurutnya, beberapa kantor kementerian negara itu telah berada di Sejong, walaupun sebagian masih berada di Seoul.

Menurutnya, tujuan pembentukan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahan yang selama ini terpusat di Jakarta akan dipindahkan.

## BADAN OTORITA

Adapun, untuk mengeksekusi rencana ini, Bappenas mengusulkan pembentukan badan otorita yang akan mengelola dana investasi pembangunan kota baru serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

Selain itu, badan itu akan mengelola aset investasi dan menyalurkan aset kepada pemerintah untuk pihak ketiga serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pemindahan kota baru.

"Badan otorita juga harus melakukan persiapan dan pembangunan ibu kota baru. Persiapan itu antara lain menyusun struktur, pola, dan tata ruang, serta membangun fasilitas pemerintahan, sarana dan prasarana gedung, dan fasilitas lain," paparnya.

Menanggapi keputusan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan di Jakarta tidak akan terhambat akibat adanya rencana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota hanya dalam aspek pemerintahan sehingga DKI Jakarta tidak akan kehilangan peran sebagai pusat perekonomian yang utama dan terpenting.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, tujuan pemindahan pusat pemerintahan sangat baik karena sebagai upaya pemerataan.

"Pusat pemerintahan Amerika Serikat di Washington, sedangkan pusat bisnisnya di New York. Ini memang bukan barang baru dan tak sulit dilakukan."

Namun, lanjutnya, pemerintah harus membuat rencana pemindahan itu secara matang karena membangun sebuah kota baru itu tak mudah. Dia mencontohkan pengembangan Batam sebagai kota bisnis yang membutuhkan waktu lama.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta, menilai pemindahan ibu kota saat ini masih belum tepat.

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kestabilan ekonomi dan membentuk suatu kajian yang melibatkan dari berbagai aspek, khususnya dunia usaha.

"Kita diskusikan [rencana ini] dalam sebuah forum melibatkan berbagai sektor usaha, apakah rencana ini menguntungkan atau [sebaliknya] meningkatkan infrastaktur di Jakarta."

Paulus Totok Lusida, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), mengatakan bahwa perpindahan ibu kota bukanlah solusi pertumbuhan perekonomian suatu negara.
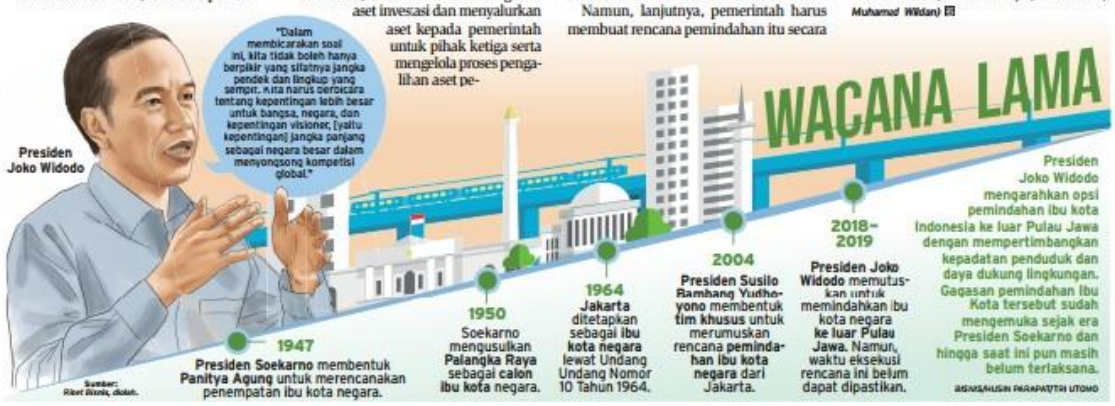
Hal utama yang perlu diperbaiki, lanjutnya, adalah menekan tingkat kepadatan penduduk serta integrasi moda transportasi suatu ibu kota. *(Yanita Petriella/ Putri Z. Salsabila/Dewi A. Zuhriyah/Andi M. Arief/ Muhamad Wildan)*